

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBATALAN AKTA OTENTIK
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT AKIBAT ADANYA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg)**

TESIS

*Scientific Paper Ini Diajukan Untuk Mendapatkan
Gelar Akademik Magister Kenotariatan*



Oleh :

ADEYUNI ANISAH, SH

NIM: 1620122005

Dosen Pembimbing :

- 1. Prof. Dr. H. Zainul Daulay, SH., MH**
- 2. Dr. Beatrix Benni, SH., MPd., MKn**

**PRODI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMBATALAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT AKIBAT ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg)

Adeyuni Anisah. 1620122005. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas. Halaman 130. Tahun 2019.

ABSTRAK

Pembuatan suatu akta otentik pada dasarnya terikat oleh bentuk dan cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan jika diabaikan dapat menimbulkan batalnya suatu akta. Salah satunya seperti pembuatan akta wasiat dan hibah yang dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila tidak memenuhi syarat-syarat tertentu maka akta-akta tersebut dapat dibatalkan. Salah satu contoh kasus yakni adanya gugatan pembatalan akta wasiat dan hibah yang dibuat dihadapan salah satu Notaris/PPAT di Kota Padang. Walaupun akta tersebut secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun secara materil terdapat kesalahan dari isi akta dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari suatu akta yang memiliki kesalahan materil pada prinsipnya akta tersebut dapat dibatalkan atau non existent, yaitu mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dalam menerima, mengadili, dan memutuskan perkara pembatalan akta wasiat dan hibah dengan Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg jika dihubungkan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan ? 2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap akta wasiat dan hibah yang telah dibatalkan melalui Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg? 3. Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2012/PN.Pdg mengenai pembatalan peralihan objek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu : 1) Terdapat klausul dalam akta hibah pada Pasal 6, jika kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri Padang. 2) Kedudukan akta wasiat dan hibah menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harta yang telah dihibahkan kembali kepada pemberi hibah. 3) Untuk pelaksanaan putusan Nomor : 57/PDT.G/2012/PN.Pdg mengenai pembatalan peralihan objek sengketa tersebut sama sekali belum diproses oleh pihak yang penggugat atau tergugat maupun pihak yang berwenang.

Kata kunci : Pelaksanaan Putusan, Pembatalan Akta, Perbuatan Melawan Hukum.

LEGAL REVIEW REGARDING THE CANCELLATION OF AUTHENTIC DEED MADE BY NOTARY/LAND DEED OFFICIAL DUE TO UNLAWFUL ACTION

(Case Study Of Court Decision Number : 57/Pdt.G/2012/PN/Pdg)

Adeyuni Anisah. 1620122005. Notary Masters Study Program. Faculty of Law. Andalas University. Page 130. In 2019.

ABSTRACT

Making a testament is bound by the form and method determined by the laws and regulations. When is ignored it may result cancellation to the testament. Similiarly, grants in any law are basically irrevocable, however if it does not meet certain conditions, the grant can be canceled. One case example is a lawsuit for the cancellation of a will and a deed made before a Notary / Conveyancer Padang City. Even though the deed is physically and formally in accordance with the provisions determined by the Law, however, there is an error from the contents of the deed due to an unlawful action. Regarding to this, the authors formulated the research problems as follows : 1. What is the legal basis of considerations of the plaintiff's claim to the Padang District Court ? 2. What are the legal consequences arising from the will and canceled grants through Decision Number : 57 / Pdt.G / 2012 / PN.Pdg ? 3. How is the implementation of Decision Number : 57 / Pdt.G / 2012 / PN.Pdg concerning the cancellation of the transfer of the object of dispute in the Padang City National Land Agency ?. This study applies a empirical juridical method. The results of the study include : 1) There is a clause in the grant deed in Article 6, if both parties in this case with all consequences choose a common and unchanging legal residence at the clerk's office of the Padang District Court. 2) The position of a will and grant becomes null and void and does not have the legal force and value that has been given back to the grantor. 3) For the implementation of decision Number: 57 / PDT.G / 2012 / PN.Pdg regarding the cancellation of the transfer of the object of the dispute, it has not yet been processed by the party who is the plaintiff or the defendant or the authorized party.

Keywords : Implementation of Decisions, Cancellation of Deeds, Unlawful Actions